

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TANA TORAJA (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)

KURNIATY SAMBARA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TANA TORAJA (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

KURNIATY SAMBARA

A31116522



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TANA TORAJA (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)

disusun dan diajukan oleh

KURNIATY SAMBARA
A31116522

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

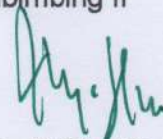
Makassar, 21 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA
NIP. 19670518 199802 2 001

Pembimbing II



Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19670414 199412 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP. 196604051992032003

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TANA TORAJA (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)

disusun dan diajukan oleh

KURNIATY SAMBARA
A31116522

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Ketua	1.....
2	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.....
3	Prof. Dr.Hj. Haliah, S.E., M.Si.,Ak., CA	Anggota	3.....
4	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M. Si., CA	Anggota	4.....



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP. 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kurniaty Sambara
NIM : A31116522
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TANA TORAJA

(Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 21 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Kurniaty Sambara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan. atas kasih karunia serta anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Tana Toraja (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)” yang merupakan salah satu syarat atau tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Yulius Sambara dan ibu Rina Dudung Malino serta saudaraku Ani, Uji, Jun dan Ian atas doa, kasih sayang, serta motivasi yang selalu diberikan kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini
2. Ibu Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku dosen Pembimbing II atas kasih dan waktu yang diluangkan dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Muh.Achyar Ibrahim, SE., Ak., M.Si., CA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku

Penasehat Akademik yang telah membimbing peneliti selama kurang lebih 4 tahun dalam mejalani proses perkuliahan.

4. Tim Penguji peneliti, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA yang telah memberikan masukan serta koreksi bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid S.E., M.Si., selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta pegawai Departemen Akuntansi atas perhatian, ilmu pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Untuk keluarga besar GMKI Kom. Ekonomi Unhas, PMKO FEB UH, IMA FEB-UH, dan Magellokestral Unhas yang senantiasa menemani dalam kasih dan memberikan dukungan sejak menjadi mahasiswa baru hingga selesainya studi peneliti.
8. Saudara Brenando M. Awusi yang menjadi sosok Kakak sekaligus sahabat yang dengan kasih, setia mendengarkan, menemani, dan memberikan semangat kepada peneliti dalam suka dan duka proses penulisan skripsi.
9. Untuk Grup Bebek, sahabat yang setia menemani sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, Arnianti, Atalya Fidela Sambenga, Nur Rahma Maeta, Angreni Efendy, Nur Afni Jabir, Nur Hadiyatullah, dan Mei Susanto terima kasih atas kebersamaan, suka dan duka selama kuliah.
10. Untuk Bobi, Kak Icha, dan Tria, selaku saudara dan sahabat yang menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga akhir studi peneliti.

11. Untuk Yosua, Sandra, dan Rio yang menjadi saudara sepelayanan, yang setia membantu dan tidak jemu-jemu menemani suka dan duka peneliti.
12. Untuk teman-teman FAM16LIA, Kakak Elling, Kak Theo, Kak AI, Kak Rizal, Irwin, dan Garry terima kasih untuk waktu, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan semasa peneliti menyusun skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang ikut memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penelitian ini, baik yang tidak disebutkan dalam skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya. Terima kasih. Tuhan Memberkati.

Makassar, 21 Januari 2021

Kurniaty Sambara

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TANA TORAJA (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF TANA TORAJA FINANCIAL STATEMENTS (Case Study at BPKAD Tana Toraja Regency)

Kurniaty Sambara
Darmawati
Syamsuddin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal, komitmen organisasi, dan penerapan SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Audit Internal, Komitmen organisasi, Penerapan SPI, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

This study aims to analyze the effect of the use of information technology, the role of internal audit, organizational commitment, and the application of SPI on the quality of local government financial reports. The method used in this research is multiple linear regression analysis. This study uses primary data through a questionnaire distributed to the respondents. The results of this study indicate that the use of information technology, the role of internal audit, and organizational commitment have an effect on the quality of local government financial reports, while the application of SPI has no effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: Utilization of Information Technology, Role of Internal Audit, Organizational Commitment, Implementation of SPI, Quality of Local Government Financial Reports

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory).....	10
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	29
2.1.5.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	30
2.1.5.2 Peran Audit Internal	32
2.1.5.3 Komitmen Organisasi.....	34
2.1.5.4 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).....	37
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Konseptual.....	44
2.4 Hipotesis Penelitian.....	45

2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	45
2.4.2 Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	45
2.4.3 Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	46
2.4.4 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Rancangan Penelitian	48
3.2 Tempat dan Waktu.....	48
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	49
3.6.1 Variabel Penelitian	49
3.6.2 Definsi operasional	50
3.7 Metode Analisis Data	52
3.8 Pengujian Kualitas Data	53
3.8.1 Uji Kualitas Data	53
3.8.1.1 Uji Reliabilitas	53
3.8.1.2 Uji Validitas	53
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	54
3.8.2.1 Uji Multikolinieritas	54
3.8.2.2 Uji Heterokedastisitas.....	54
3.8.2.3 Uji Normalitas.....	55
3.8.3 Uji Hipotesis.....	56
3.8.3.1 Pengujian Koefisien Determinansi (R^2).....	56
3.8.3.2 Uji Simultan (Uji F)	57
3.8.3.3 Uji Parsial (Uji T)	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.2 Hasil Penelitian	59
4.3 Hasil Pengujian Kualitas Data	64
4.3.1 Uji Kualitas Data	64

4.3.1.1 Uji Realibilitas	64
4.3.1.2 Uji Validitas	65
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	69
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	70
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas	71
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.3.3 Uji Hipotesis.....	74
4.3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda	74
4.3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.3.3.3 Uji Statistik F (Simultan).....	77
4.3.3.4 Uji T (Parsial)	78
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan Penelitian.....	84
5.2 Keterbatasan Penelitian	85
5.3 Saran Penelitian.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Tabel Perkembangan Opini LKPD Periode 2014-2018.....	3
2.1	Ikhtisar Penelitian Terdahulu	42
3.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian	50
4.1	Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin.....	59
4.2	Distribusi Responden menurut Usia.....	60
4.3	Distribusi Responden menurut Pendidikan Terakhir	61
4.4	Distribusi Responden menurut Masa Kerja.....	61
4.5	Distribusi Frekuensi Nilai Variabel	62
4.6	Hasil Uji Reliabilitas	65
4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan . Pemerintah Daerah	66
4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	67
4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Peran Audit Internal.....	68
4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi	68
4.11	Hasil Uji Validitas Variabel SPI	69
4.12	Hasil Uji Normalitas	70
4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	71
4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel	73
4.15	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	74
4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	76
4.17	Hasil Uji Simultan (Uji f)	77
4.18	Hasil Uji Parsial (uji t).....	78
4.19	Hasil Uji Hipotesis.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	44
4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	89
2	Kuesioner Penelitian.....	91
3	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	100
4	Tabel Statistik Deskriptif	105
5	Hasil Uji Kualitas Data	108
6	Hasil Uji Asumsi Klasik	116
7	Hasil Uji Hipotesis.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era industri 4.0 perubahan dan perkembangan teknologi informasi mempengaruhi perubahan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pada era ini pemerintah daerah secara profesional dan diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dengan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan ada 9 (sembilan) aspek yang harus diterapkan dalam mewujudkan prinsip *good governance* yakni, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis.

Salah satu bentuk transparansi adalah dibuatnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah telah melaksanakan prinsip *good governance* sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam wujud pengelolaan keuangan secara transparan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang penyajiannya diharapkan benar-benar harus berkualitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Laporan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat

dibandingkan serta dapat dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya.

Untuk menilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, laporan tersebut akan diperiksa Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen dan mandiri yang akan memberikan opini atau kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Ada 4 jenis opini yang akan diberikan berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 yaitu, (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Opini Wajar dengan Pengecualian, (3) Opini Tidak Wajar, dan (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini. Dari keempat jenis opini tersebut, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi yang menggambarkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan disusun sesuai dengan standar. Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, utamanya pada bidang keuangan daerah. Selain itu pencapaian Opini WTP oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kriteria untuk mendapatkan dana intensif daerah yang akan sangat menguntungkan untuk daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011.

Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan diberikan berdasarkan kriteria umum dalam UU No.15 Tahun 2004, yaitu (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Efektivitas Pengendalian Intern, (3) Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan; dan (4) Pengungkapan yang Lengkap. Keempat kriteria tersebut akan mempengaruhi jenis opini yang diberikan oleh BPK selaku pemeriksa keuangan. Hasil pemeriksaan BPK akan menghasilkan opini dan dijadikan tolak ukur

apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan daerah secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Sebagai gambaran pemberian opini terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dari periode 2014-2018 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2018 *)

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Prov. Sulawesi Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Makassar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Gowa	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Takalar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Jeneponto	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP
6	Kab. Bantaeng	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Bulukumba	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Kepulauan Selayar	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Maros	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Pangkajene dan kepulauan (Pangkep)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Barru	WTP	TW	WTP	WTP	WTP
12	Kota Pare-pare	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
13	Kab. Pinrang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Sidrap	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Enrekang	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP

16	Kab. Tana Toraja	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
17	Kab. Toraja Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Bone	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Soppeng	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kab. Wajo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kab. Sinjai	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
22	Kab. Luwu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Palopo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kab. Luwu Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kab. Luwu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*) Data sampai dengan Semester II 2018

Sumber Data : diolah dari Laporan BPK

Perkembangan opini dari setiap daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014-2018 yang berkembang pesat merupakan suatu prestasi positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta setiap kabupaten dan kotanya. Namun, ada beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum mendapatkan opini WTP terhadap LKPD yang disusunnya, antara lain; Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan Tana Toraja. Opini atas LKPD pada Kabupaten Tana Toraja dari tahun anggaran 2014-2018 belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan bahkan sempat mendapatkan Opini Tidak Wajar (TW) pada tahun anggaran 2015.

Penyajian LKPD Kabupaten Tana Toraja, tidak mengalami perkembangan signifikan seperti daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. BPK mengindikasikan adanya berbagai kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan.

pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja karena tidak tepat dalam pencatatan dan pengelolaan asetnya. Penyajian nilai aset tetap di neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri; serta aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan, merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dari Laporan Hasil Pemiksaan tahun anggaran 2016 yang dikeluarkan oleh BPK RI, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan nilai aset tetap yang berbeda di Neraca dengan Kartu Inventaris Barang. Adanya selisih nilai tersebut menandakan bahwa nilai aset yang tercantum di Neraca merupakan nilai yang tidak valid, sebagaimana diatur dalam Permendagri no.17 tahun 2007 nilai aset yang ada dalam Kartu Inventaris Barang harus sama dengan nilai yang ada di Neraca SKPD. Kurangnya bukti bukti pemeriksaan terkait selisih nilai aset tersebut pun juga mengakibatkan BPK sulit untuk menguji kewajaran aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pemerintah Tana Toraja.

Permasalahan Aset tersebut merupakan salah satu contoh yang menandakan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang lemah sehingga tidak diperoleh keyakinan atas Laporan Keuangannya. Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga merupakan faktor yang mempengaruhi baik dan buruknya suatu kualitas laporan keuangan. Indriasih (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah yang tidak efektif merupakan penyebab utama lemahnya kualitas pelaporan keuangan di tiap-tiap unit pemerintah daerah.

Selain itu komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak mendukung penciptaan kualitas laporan keuangan dengan baik sehingga Laporan Keuangan yang berkualitas untuk mendapat Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK sulit diraih. Beberapa entitas yang belum mendapatkan Opini WTP memiliki masalah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dimana dinilai kurang tepat dalam pengambilan keputusan serta tidak akuntabilitasnya laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. (Dadang Suwanda, 2014)

Faktor selanjutnya yaitu, Peran Audit Internal. Peran Audit Internal juga mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Peran internal audit/inspektorat sebagai aparat pengawas internal pada pemerintah daerah melaksanakan fungsi kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran perbaikannya (AAIPI, 2013).

Selain itu komitmen organisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Wibowo (2015:188) mengatakan komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sumber daya manusia yang mengerjakannya harus sadar akan kewajiban yang dimilikinya, hal tersebut akan tercermin melalui komitmen organisasinya. Carsten dan Spector dalam Adifitya (2014:837) mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu

meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan penelitian eksplanatory yaitu ingin menguji kembali beberapa hipotesis yang diteliti sebelumnya dengan objek atau instansi pemerintah yang berbeda. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Tana Toraja (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Tana Toraja)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja?
2. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja?
4. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja
2. Mengetahui pengaruh Peran Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi dan pengembangannya, khususnya pada *auditing* dalam membahas kualitas laporan keuangan sebagai upaya pencapaian opini WTP untuk pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait yang diteliti dan dapat menjadi pedoman untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah untuk memperoleh opini WTP

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan berbagai landasan teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang gambaran instansi, deskripsi sampel penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi adalah teori yang didasarkan pada teori ekonomi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai:

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Dari sudut pandang teori agensi, principal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa principal bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Agen dan Prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan sering kali kepentingan keduanya berbenturan.

Zimmer (1997) menjelaskan bahwa masalah keagenan juga dapat terjadi di bidang pemerintahan. Dalam pemerintahan, masyarakat akan bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah bertindak sebagai agen (Lupia dan McCubbins, 2000). Anvig dkk (dalam Sandy 2017) mengatakan bahwa bisa saja agen bertindak diluar batas hukum kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan prinsipal. Pemerintah sebagai agen yang dapat mengakses langsung informasi dibandingkan masyarakat akan menyebabkan masalah keagenan.

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan good governance. Pemerintah Daerah harus mengungkapkan informasi secara jelas, relevan dan terperinci terkait dengan data akuntansi. LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan guna untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu Pemerintah selaku agen, harus menciptakan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, Principal yang mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Darmawati, 2019).

Akuntabilitas publik oleh Mardiasmo (2004) dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori keagenan. Organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan hasil pemeriksaan dari BPK atas laporannya akan menunjukkan kredibilitasnya, dan mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Pemerintah sebagai agen akan menyusun laporan keuangan yang kemudian akan diperiksa oleh BPK, sebagai gambaran pengelolaan keuangan daerah yang telah dipercayakan kepada pemerintah sebagai agen. Opini Wajar Tanpa Pengecualian menjadi opini penilaian tertinggi yang akan diberikan oleh BPK, yang sekaligus menjadi gambaran untuk masyarakat dalam menilai pemerintah daerahnya dalam mengelola keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 paragraf menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 1) Aset; 2) Kewajiban; 3) Ekuitas; 4) Pendapatan-LRA; 5) Belanja; 6) Transfer; 7) Pembiayaan; 8) Saldo Anggaran Lebih; 9) Pendapatan-LO; 10) Beban; dan 11) Arus Kas. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam satu periode. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2002) adalah:

- 1) untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
- 2) untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah
- 2) memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya
- 3) memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan
- 4) memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional
- 5) memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan di pemerintahan merupakan satu atau lebih entitas akuntansi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk umum, yang terdiri dari:

- a) Pemerintah pusat;
- b) Pemerintah daerah;

- c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d) Satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

LKPD adalah suatu informasi dimana memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang adalah cerminan hasil aktivitas tertentu.

Berdasarkan Lampiran 1 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan mencakup laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen terdiri atas;

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntansi dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: a) Pendapatan-LRA; b) Belanja;

c) Transfer; d) Surplus/Defisit-LRA; e) Pembiayaan; dan f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ;

- a) Saldo anggaran lebih awal;
- b) Penggunaan saldo anggaran ebih;
- c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo anggaran lebih akhir.

3) Neraca,

Neraca menginformasikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;

- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang;
- i) ekuitas.

4) Laporan Operasional,

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan laporan operasional periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi;

- a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) mengenai operasi keuangan keseluruhan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

- d) Penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Dalam Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca terkait kelengkapan dalam pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), Laporan Operasional disusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) pendapatan-LO
- b) beban
- c) surplus/defisit dari operasional
- d) kegiatan non operasional
- e) surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f) pos luar biasa
- g) surplus/defisit-LO

5) Laporan Arus Kas,

Tujuan Laporan arus kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ;

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya;
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi tetap
- d) Ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Dalam pelaporan Entitas diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami atau pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fisik/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama periode tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fisik/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain;

- a) Pengakuan pendapatan-LRA;
- b) Pengakuan pendapatan-LO;
- c) Pengakuan belanja;
- d) Pengakuan beban;
- e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- f) Investasi;
- g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- h) Kontrak-kontrak konstruksi;
- i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- k) Biaya penelitian dan pengembangan;
- l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- m) Pembentukan dana cadangan;
- n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- a) Anggaran;
- b) Realisasi;

- c) Prosentase pencapaian;
- d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
- j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti;

- a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada neraca;
- d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yakni:

1) Basis Akuntansi (*Accounting Based*)

Laporan keuangan pemerintah menggunakan pelaporan dengan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan secara wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitas, maka hal-hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik b bbb,.l.l. metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas organisasi. Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi (Tjiptono 20014). Menurut Fahmi dalam Sri Nurul Fajri (2013) kualitas laporan keuangan adalah Laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014). Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dan dinilai dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif atau standar yang perlu diwujudkan untuk informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah:

1) Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:

1. Memiliki nilai umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakang setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan seluruh fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut memiliki potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertibnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas (Daniel Kartika dkk.,2013). Sistem Pengendalian Intern dapat mencerminkan kualitas suatu laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki

fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi. Efektivitas sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi sehingga dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan. Pengendalian Intern bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi termasuk kualitas laporan keuangan, mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Penerapan sistem pengendalian intern dapat mencegah adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi (Udiyanti, 2014) dan berimplikasi pada kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi akan menjadi acuan terhadap pencapaian tujuan organisasi, yang tidak lain yaitu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan aturannya. Jika SDM sadar dan memiliki komitmen dalam organisasi tersebut, ia akan mengarahkan segala kemampuannya karena merasa bahwa ia memiliki keharusan untuk itu.

Bukan hanya Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi, Peran Audit Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi juga mempengaruhi proses akuntansi dalam pemerintahan untuk menghasikan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.5.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Roviyantie 2011, dalam Lilis Setyowati 2016).

Menurut Pradono dan Basukianto (2015), dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan pengguna jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, yaitu :

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Dengan berkembangannya teknologi informasi Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Adanya teknologi informasi diharapkan akan membantu dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas dimana lebih akurat dan mengurangi adanya kekeliruan.

2.1.5.2 Peran Audit Internal

Internal Auditing adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Sawyer (2005) mengemukakan bahwa Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

- 1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
- 2) Risiko yang dihadapi perusahaan (dalam hal ini pemerintah daerah) telah diidentifikasi dan diminimalisir
- 3) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti
- 4) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
- 5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
- 6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Inspektorat dipimpin oleh

inspektur di mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Definisi Audit Internal menurut *Institute of Internal Auditor (IIA)* (dikutip oleh Messier 2005 dalam Ade Suherman 2018) adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.

Dalam *The International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*, peran auditor internal dibedakan menjadi dua yaitu jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Pemberian jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem ataupun permasalahan lainnya. Sedangkan jasa konsultasi termasuk pemberian saran, dan secara umum dilakukan atas permintaan khusus dari klien.

PP No.60 tahun 2008 inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah harus berkompeten, independen, dan objektif. Independen maksudnya yaitu APIP dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Secara berkala, inspektorat jendral atau inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada

menteri negara pendayagunaan aparatur Negara, seperti yang dijelaskan dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang SIP pasal 57 ayat 3. Proses review kemudian akan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan oleh audit internal atau inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

2.1.5.3 Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi menurut Mowday et al. (1982) menyatakan bahwa komitmen yang kuat dalam organisasi akan dapat menciptakan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap organisasi sangat penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, di mana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaan. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal, yang terkadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan. Komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang karyawan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Berikut tiga karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi.

- 1) Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi
- 2) Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi
- 3) Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi

Aranya *et al.*(1980) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai :

- 1) Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-nilai dari organisasi dan/atau profesi
- 2) Suatu kemauan untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan/atau profesi
- 3) Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan/atau profesi

Komitmen organisasi terbangun apabila setiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan berikut terhadap organisasi dan/atau profesi

- 1) Identifikasi (*identification*) merupakan pemahaman ataupun penghayatan terhadap tujuan organisasi
- 2) Keterlibatan (*involvement*) merupakan suatu perasaan merasa terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa yang dikerjakan itu menyenangkan
- 3) Loyalitas (*loyalty*) merupakan perasaan dimana organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Menurut Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009 : 205) komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi. Hasil penelitian Quest tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil :

- 1) Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi dengan tingginya motivasi dan meningkatkan kinerja
- 2) Komitmen tinggi berkorelasi dengan kemandirian dan self control
- 3) Komitmen tinggi berkorelasi dengan kesetiaan terhadap organisasi
- 4) Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya

Di dalam pemerintahan, karyawan yang memiliki dan sadar akan komitmen organisasi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada.

Spark dan Shelby (1998), melalui sampel riset terhadap pada manajer pemasaran, mengemukakan bahwa komitmen organisasi mempunyai hubungan dengan orientasi etika dan sensitivitas etika. Hasil riset ini didukung oleh riset lain yang dilakukan sebelumnya oleh Volker (1984) terhadap profesi konsultan manajemen, dan oleh Shaub (1989) terhadap profesi akuntan publik. Berikut tiga komponen utama mengenai komitmen organisasi :

- 1) Komitmen afektif (*affective commitment*) terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional (*emotional attachment*) atau psikologis terhadap organisasi
- 2) Komitmen kontinu (*continuance commitment*) muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan organisasi tersebut.
- 3) Komitmen normative (*normative commitment*) timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut

merupakan hal yang memang harus dilakukan. Jadi, karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa berkewajiban untuk itu.

2.1.5.4 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut ;

“Pengenadalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi”.

Penerapan SPI merupakan pelaksanaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara berkesinambungan untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap aset Negara, serta menaati peraturan peundang-undangan yang berlaku. SPI juga adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan (*fraud*)

Sedangkan *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision* (COSO 2013 : 3) mendefinisikan pengendalian internal yaitu:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian internal merupakan proses, karena hal tersebut mencakup kegiatan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini kemudian menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimana pun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya tergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhi kebijakan manajemen maka perlu adanya suatu koordinasi sistem pengendalian internal yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran data tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan adopsi dari *The Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisions (COSO) Internal Control Framework* dimana dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat *intergrated* dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintahan yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menyediakan landasan bagi kelangsungan pengendalian intern dalam sebuah organisasi. Lingkungan Pengendalian yang baik akan memungkinkan terciptanya atmosfer yang kondusif dan mengatur nada (*sets the tone*) bagi penerapan pengendalian intern yang efektif. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintahan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan serta penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintahan yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintahan terkait

2) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 13, Menetapkan strategi operasional yang konsisten, dan strategi manajemen terintegrasi serta rencana penilaian risiko adalah hal yang perlu dilakukan agar tercapainya tujuan instansi pemerintah yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup :

- a. review atas kinerja Instansi Pemerintahan yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik dan aset;
- e. penetapan serta review atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu terhadap transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- k. pendokumentasian yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 41 dan Pasal 42, Pimpinan Instansi Pemerintahan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Setiap komunikasi atas adanya informasi tersebut kemudian harus diselenggarakan secara efektif. Komunikasi yang efektif yang dimaksudkan yaitu :

- a. menyediakan serta memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; juga

b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara berkesinambungan

5) Pemantauan

Menurut PP Nomor 60 tahun Pasal 43, Pimpinan Instansi wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kualitas laporan keuangan daerah banyak dilakukan dengan melibatkan berbagai variabel yang dianggap berpengaruh. Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai penunjang pada penelitian ini. Penelitian oleh Ruswanto (2017) dan Merita (2017) menyimpulkan bahwa Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun sebaliknya dalam penelitian Nanang (2016) dihasilkan bahwa Peran Auditor Internal kemudian tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain Peran Auditor Internal, Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan hal ini kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Noprial (2015).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Rahmawati (2016) melibatkan variabel sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Sistem Internal, pada 88 pegawai SKPD di Magelang. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan pengendalian sistem internal tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noprial (2015) pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa pengendalian sistem intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 2.1 Ikhtisar Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI DAN TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PEMERIKSAAN (KESIMPULAN)
1	Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh.Saleh (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu	Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan daerah Variabel Independen : Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit	Ketiga variable independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini (2016)	Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan daerah Variabel Independen : Kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Standar Akuntansi Pemerintahan,	Penerapan SAKD dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan Kompetensi SDM dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan daerah

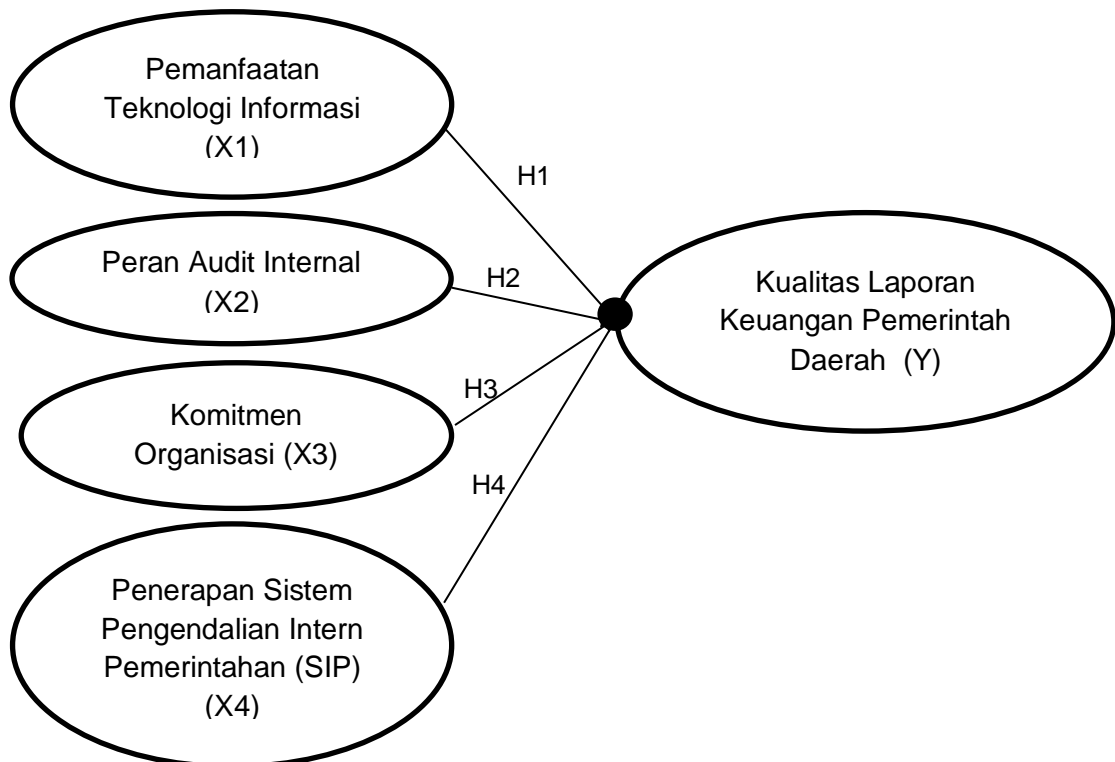
			dan Pengendalian Intern	
3	Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan daerah Variabel Independen: Gaya Kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi	Semua variable independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4	Noprial Valenra Maksyur (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Kualitas Sumber daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketiga Variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
5	Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S. Purnomo (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Variabel Independen: Sistem	Variabel Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel Kekuatan

		Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)	Pengendalian Intern dan Kekuatan Koersif	Koersif berpengaruh
--	--	--	---	------------------------

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan teori yang telah diberikan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi, maka kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 menggambarkan bagaimana *Pemanfaatan Teknologi Informasi*,

Peran Audit Internal, Komitmen Organisasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi Informasi yang semakin maju akan memberikan dampak positif jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Adanya berbagai teknologi informasi ini dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi dengan lebih cepat serta lebih akurat dan meminimalisir adanya kekeliruan (Indriasari 2008, dalam Agung dan Gayatri 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Gayatri menunjukkan bahwa pemanfaat teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.2 Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Internal Audit juga ikut berperan dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas proses pelaksanaan dan pelaporan akuntansi dapat diberikan jaminan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan. Penilaian yang sistematis dan objektif yang dilaksanakan oleh Auditor Internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam suatu organisasi merupakan pengertian dari internal audit. Selain memberikan jaminan bahwa pelaksanaan dan pelaporan akuntansi sesuai dengan standar, peran lain dari auditor internal adalah memberikan jasa konsultasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Diani 2009, dalam Nanang 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Ruswanto dkk (2017) yang melibatkan variable Peran Audit Internal menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Kualitas LKPD akan meningkat seiring dengan meningkatnya peran internal audit pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3 Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen Organisasi menunjukkan loyalitas seorang anggota organisasi untuk tetap bertahan dalam organisasi serta keinginan untuk berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik bagi kepentingan organisasi itu sendiri (Luthan dalam Tut Madiguna, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nopprial (2015, Tut Madiguna dan Gayatri (2018), menemukan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga semakin tinggi komitmen anggota atau pegawai, maka semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.4 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI adalah kegiatan pengendalian terutama terhadap pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Sagung dan Nyoman (2016) yang melibatkan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel penelitiannya, memberikan hasil bahwa, penerapan Sistem Pengendalian Intern akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah